



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 1992

TENTANG

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH
KELURAHAN**



BAGIAN HUKUM

**SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 1992**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 1992 SERI D NO.SERI 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 1992
TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU : SUNGAI
SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURA
HAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN ,

- mbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerin
tah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyeleng
garakan tugas-tugas Pemerintahan; Pembangunan dan
Pelayanan kepada Masyarakat; perlu dilaksanakan -
upaya peningkatan pendapatan Desa dan Kelurahan -
melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pa -
jak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan kepada Peme
rintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- b. bahwa pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi -
Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Ting
kat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelu
rahan telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan keputusan Nomor 49 Tahun 1990 dan Nomor 98
Tahun 1990 ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konside
ran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemb
tukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
Pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Desa : adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah

Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

d. Kelurahan : adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

c. Pemerintahan : adalah a. Kepala Desa
Desa b. Lembaga Musyawarah Desa ;

d. Pemerintahan : adalah terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;

g. Anggaran Desa: adalah rencana operasinal tahunan dari pada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa;

h . Anggaran Kelurahan : adalah rencana opresional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan .

tertinggi pengeluaran Keuangan Kelurahan ;

: adalah Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Subsidi / sumbangan Pemerintah Daerah .

B A B II

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagai Subsidi/Sumbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan .
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun Anggaran .

B A B III

ALOKASI DAN TATACARA PENYALURAN DANA

Pasal 3

- (1) Alokasi dana penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat(1) Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat serta pemerataan untuk membantu Desa Kritis dan Kelurahan yang telah Lunas Pajak Bumi dan Bangunan .

B A B IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

- 1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat(1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Desa dan Anggaran Kelurahan .

- (2) Hasil penerimaan sebagaimana ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat .

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini ~~berlaku~~ pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 18 Juni 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,
HULU SUNGAI SELATAN
K e t u a ,

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA

Cap. dtt.

H. MOH. ARLAN, SH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

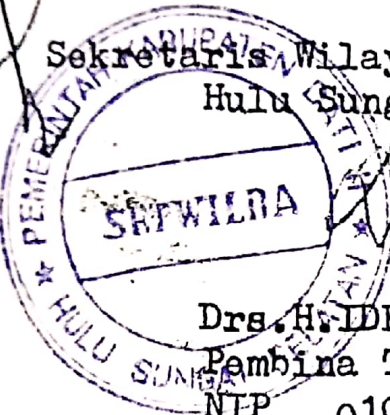
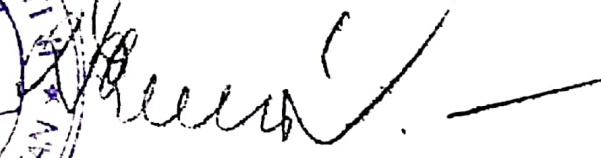


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan :

Nomor : 12 .
Pada Tanggal : 17 Nopember 1992
Tahun : 1992 .
Seri : D .
Nomor Seri : 10 .

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan dengan Keputusan :
Tanggal : 29 Oktober 1992
Nomor : 57/SK-1/KUM .


Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan

Drs. H. IDERIS APSANI
Pembina Tk I
NIP . 010 041 008